

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang¹. Jadi, persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa perekonomian akan terus berlanjut. Ekonomi dikatakan tumbuh atau berkembang apabila terjadi pertumbuhan output riil perkapita.

Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan, ada perbedaan dalam istilah perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengganti situasi keseimbangan yang ada sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan

¹ Boediono. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. (Yogyakarta : BPFE , 2007) hlm .44

penduduk². Hicks mengemukakan masalah negara terbelakang menyangkut pengembangan sumber-sumber yang tidak atau belum dipergunakan, kendati penggunaannya telah cukup dikenal, sedangkan masalah negara maju terkait pada pertumbuhan karena kebanyakan dari sumber mereka sudah diketahui dan dikembangkan sampai batas tertentu.

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap yang berurutan yang dimulai dari masa berburu, masa berternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan, dan tahap masa industri. Menurut teori ini masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi, pembagian tenaga kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori ini, dalam upaya peningkatan produktifitas kerja.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara (daerah) yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya, yang terwujud dengan

² Jhingan, M.L.2000. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada ,2000) hlm.4

adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya³.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi berfokus pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat⁴. Atas sudut pandang tersebut, penelitian ini menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi yang akan dilihat dari sudut pandang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu (PDRB_t) dengan PDRB sebelumnya (PDRB_{t-1}).

$$\text{Laju Pertumbuhan } (\Delta Y) = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan faktor non ekonomi⁵ :

A. Faktor Ekonomi

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh dan banggunya merupakan konsekuensi dari perubahan

³ Michael P. Todaro, dkk. *Pembangunan Ekonomi/Edisi ke 9, Jilid 1*, hlm.144

⁴ Djojo Hadikusumo, Sumitro. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi.*(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 1994) hlm. 132

⁵ Jhingan, ML. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan.* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000) hlm.67

yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut. Beberapa faktor ekonomi tersebut akan dibahas dibawah ini:

1) Sumber Alam

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah. Bagi pertumbuhan ekonomi, tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang sangat penting. Suatu negara atau daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat.

2) Akumulasi Modal

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu dapat dikatakan sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi.

3) Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil risiko di antara ketidakpastian.

4) Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. Perubahan pada teknologi telah menaikkan produktivitas buruh, modal dan faktor produksi yang lain.

5) Pembagian Kerja dan Skala Prioritas

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Dengan ini laju pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

B. Faktor Non Ekonomi

Selain adanya faktor ekonomi, faktor non ekonomi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. Faktor non ekonomi tersebut meliputi :

1). Faktor Sosial

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur, dan nilai-nilai sosial. Orang dibiasakan menabung dan berinvestasi, dan menikmati risiko untuk memperoleh laba dalam rangka memaksimalkan output berdasarkan input tertentu. Kebebasan agama dan ekonomi mendorong perubahan pandangan dan nilai sosial sehingga sangat membantu pertumbuhan ekonomi modern.

2). Faktor Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumberdaya manusia saja, tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka. Penggunaan secara tepat sumberdaya manusia untuk pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan dua cara berikut. *Pertama*, harus ada pengendalian atas perkembangan penduduk. *Kedua*, harus ada perubahan dalam pandangan tenaga buruh. Persyaratan yang paling penting bagi laju pertumbuhan industri adalah manusia. Manusia, di atas segalanya yang berdedikasi terhadap pembangunan ekonomi negerinya atau daerahnya.

3). Faktor Politik dan Administratif

Faktor politik dan administratif juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu daerah.

Profesor Kuznets dalam Todaro juga mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi. Karakteristik proses pertumbuhan ekonomi tersebut meliputi: 1) tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan

penduduk yang tinggi; 2) tingkat kenaikan total produktivitas faktor yang tinggi; 3) tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi; 4) tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi; 5) adanya kecenderungan negara-negara (daerah) yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha menambah bagian-bagian dunia atau daerah lainnya sebagai daerah pemasaran dari sumber bahan baku yang baru; dan 6) terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga bagian penduduk dunia⁶.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan⁷. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat.

⁶ Michael P. Todaro, dkk. *Pembangunan Ekonomi/Edisi ke 9, Jilid 1*, hlm.144

⁷Michael P. Todaro, dkk. *Pembangunan Ekonomi/Edisi ke 9, Jilid 1*. Alih Bahasa :Aris Munandar dan Puji A.L (Jakarta : Erlangga, 2006) hlm.77

Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentasi investasi pemerintah terhadap total investasi, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

Menurut Arsyad pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/Pendapatan Nasional Bruto⁸ tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara. "pertumbuhan" (*growth*) tidak identik dengan "pembangunan" (*development*).

Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional.

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi adalah

⁸ Arsyad. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: BPF, 2004) Hlm. 46

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan.

Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada "proses", karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

Point teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yaitu kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja (sumber daya manusia), penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi⁹

2. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam

⁹Michael P. Todaro, dkk. *Pembangunan Ekonomi/Edisi ke 9, Jilid 1*. Alih Bahasa : Aris Munandar dan Puji A.L (Jakarta : Erlangga, 2006) hlm.79

Dalam pertumbuhan ekonomi ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut adalah¹⁰

:

1. Sumberdaya yang dapat dikelola (*investible resources*)
2. Sumberdaya manusia (*human resources*)
3. Wirausaha (*entrepreneurship*)
4. Teknologi (*technology*)

Islam juga melihat bahwa faktor-faktor di atas juga sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi.

1. SDM yang dapat dikelola (*investable resources*)

Pertumbuhan ekonomi sangat membutuhkan sumberdaya yang dapat digunakan dalam memproduksi asset-asset fisik untuk menghasilkan pendapatan. Aspek fisik tersebut antara lain tanaman industri, mesin, dsb. Pada sisi lain, peran modal juga sangat signifikan untuk diperhatikan. Dengan demikian, proses pertumbuhan ekonomi mencakup mobilisasi sumberdaya, merubah sumberdaya tersebut dalam bentuk asset produktif,

¹⁰ Abul Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Growth in An Islamic Economy*, tulisan dalam *Development and Finance in Islam* (Malaysia, International Islamic University Press, 1987), 56

serta dapat digunakan secara optimal dan efisien. Sedangkan sumber modal terbagi dua yaitu sumber domestik/internal serta sumber eksternal.

Negara-negara muslim harus mengembangkan kerjasama ekonomi dan sedapat mungkin menahan diri untuk tidak tergantung kepada sumber eksternal. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir beban hutang yang berbasis bunga dan menyelamatkan generasi akan datang dari ketergantungan dengan Barat.¹¹ Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan sumberdaya domestik seperti tabungan dan simpanan sukarela, pajak ataupun usaha lain berupa pemindahan sumberdaya dari orang kaya kepada orang miskin.

2. SDM (*human resources*)

Faktor penentu lainnya yang sangat penting adalah sumberdaya manusia. Manusialah yang paling aktif berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Peran mereka mencakup

¹¹Beban hutang merupakan permasalahan dunia yang saat ini sangat sulit dicari jalan keluarnya. Beban ini sangat terasa khususnya bagi negara-negara berkembang. Solusi yang diberikan selama ini terkesan tambal sulam. Biasanya pemecahannya berupa pemberian tambahan pinjaman baru yang menyebabkan jumlah hutang yang ditanggung negara penghutang semakin membengkak. Padahal jumlah angsuran utang pokok dan bunga yang diteima oleh bank dunia sudah melebihi jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia kepada negara dunia ketiga secara menyeluruh. Lihat pada Sumitro Djoyohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta, Obor Indonesia, 1991), 384.

beberapa bidang, antara lain dalam hal eksploitasi sumberdaya yang ada, pengakumulasian modal, serta pembangunan institusi sosial ekonomi dan politik masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, maka perlu adanya efisiensi dalam tenaga kerja. Efisiensi tersebut membutuhkan kualitas professional dan kualitas moral. Kedua kualitas ini harus dipenuhi dan tidak dapat berdiri sendiri. Kombinasi keduanya mutlak dipadukan dalam batas-batas yang rasional.

Prinsip Islam terlihat berbeda dengan mainstream ekonomi konvensional yang hanya menekankan pada aspek kualitas profesional dan mengabaikan kualitas moral. Moral selama ini dianggap merupakan rangkaian yang hilang dalam kajian ekonomi. Maka Islam mencoba mengembalikan nilai moral tersebut. Oleh karena itu, menurut Islam untuk dapat menjadi pelaku ekonomi yang baik, orang tersebut dituntun oleh syarat-syarat berikut :

- a. Suatu kontrak kerja merupakan janji dan kepercayaan yang tidak boleh dilanggar walaupun sedikit. Hal ini memberikan suatu jaminan moral seandainya ada penolakan kewajiban dalam kontrak atau pelayanan yang telah ditentukan.
- b. Seseorang harus bekerja maksimal ketika ia telah menerima gaji secara penuh. Ia dicela apabila tidak memberi kerja yang baik.
- c. Dalam Islam kerja merupakan ibadah sehingga memberikan implikasi pada seseorang untuk bekerja secara wajar dan profesional.

3. Wirausaha (*entrepreneurship*)

Wirausaha merupakan kunci dalam proses pertumbuhan ekonomi dan sangat determinan. Wirausaha dianggap memiliki fungsi dinamis yang sangat dibutuhkan dalam suatu pertumbuhan ekonomi. Nabi Muhammad Saw, dalam beberapa hadits menekankan pentingnya wirausaha. Dalam hadits riwayat Ahmad beliau bersabda, "*Hendaklah kamu berdagang (berbisnis), karena di dalamnya teedapat 90 % pintu rezeki*". Dalam hadits yang lain beliau bersabda, "*Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah perdagangan (bisnis)*".

Menurut M.Umer Chapra, dalam buku *Islam and Economic Development*, bahwa salah satu cara yang paling konstruktif dalam mempercepat pertumbuhan yang berkeadilan adalah dengan membuat masyarakat dan individu untuk mampusemaksimal mungkin menggunakan daya kreasi dan artistiknya secara profesional, produktif dan efisien.¹²

Dengan demikian, semangat *entrepreneurship* (kewirausahaan) dan kewiraswastaan harus ditumbuhkan dan dibangun dalam jiwa masyarakat. Dr.Muhammad Yunus telah menekankan pentingnya pembangunan jiwa wirausaha dalam pembangunan ekonomi di negara-negara muslim yang tergolong miskin. Dalam hal ini ia mengatakan, : "*Upah buruh bukanlah satu jalan mulus bagi pengurangan kemiskinan, justru wirausahalah yang mempunyai potensi lebih besar dalam meningkatkan basis-basis asset individual daripada yang dimiliki oleh upah kerja.*"¹³

Menumbuhkan kembangkan jiwa kewisahausahaan akan mendorong pengembangan usaha kecil secara signifikan. Usaha kecil, khususnya di sektor produksai akan menyerap tenaga kerja

¹² M.Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, The International Institute of Islamic Throught, (IIIT), USA, 1992. Edisi Indonesia, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta, Risalah Gusti, 1999), 136

¹³ Muhammad Yunus, *The Poor as the Engine of Development* (Economic Impact 2, 1988), 31

yang luas dan jauh lebih besar. Beberapa studi yang dilakukan di sejumlah negara oleh Michigan State University dan para sarjana, telah menunjukkan secara jelas kontribusi yang besar dan industri kecil dan usaha mikro dalam memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Mereka mampu menciptakan lapangan kerja bahkan secara tidak langsung mereka berarti mengembangkan pendapatan dan permintaan akan barang dan jasa, peralatan, bahan baku dan ekspor. Mereka adalah industri padat karya yang kurang memerlukan bantuan dana luar (asing), bahkan kadang tidak begitu tergantung kepada kredit pemerintah dibanding industri berskala besar.

Karena itu, tidak mengherankan apabila saat ini muncul kesadaran yang meluas bahwa strategi industrialisasi modern yang berskala besar pada dekade terdahulu secara umum telah gagal memecahkan masalah-masalah keterbelakangan global dan kemiskinan.¹⁴ Litte, Scietovsky dan Scott telah menyimpulkan bahwa industri-industri modern yang berskala besar biasanya kurang dapat menghasilkan keuntungan daripada industri-industri kecil, di

¹⁴ Carl Lidholm dan Donald Mead, *Small Scale Enterprise : A Profile*, diproduksi kembali dari *Small Scale Industries in Developing Countries : Empirical Evidence and Policy Implication*, Michigan State University Development Paper (Economic Impact 2, 1998), 12.

samping itu industri besar lebih mahal dalam hal modal dan lebih sedikit menciptakan lapangan pekerjaan.¹⁵ Karena itulah Usaha Mikro (Industri kecil) secara luas dipandang sebagai suatu cara yang efektif untuk meningkatkan kontribusi sektor swasta, baik untuk tujuan-tujuan pertumbuhan maupun pemerataan bagi negara-negara berkembang.¹⁶

Banyak para sarjana meragukan kontribusi industri-industri besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dibanding industri kecil dan usaha mikro.¹⁷ Karena itulah Hasan Al-Banna memberikan dan mengembangkan industri rumah tangga yang utama dalam pembahasannya tentang reformasi ekonominya sesuai dengan ajaran Islam. Hal itu beliau tekankan karena akan membantu penyediaan lapangan kerja produktif bagi semua anggota masyarakat miskin, dengan demikian akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.¹⁸

¹⁵ Ian Liddle, Tibor Scitovsky dan Maurice Scott, *Industri and Trade in Some Developing Countries* (London, Oxford University Press, 1970), 91

¹⁶ Graham Gudgin, *Industrial Location Process and Employment Growth* (London: Gower, 1997), 8 dan lihat pula David Birch, *The Job Generation Process* (Cambridge, Mass: MIT Program on Neighbourhood and Regional Change), 1979.

¹⁷ Mariluz Cortes, Albert Berry dan Asfaq Ishaq, *Successes in Small and Medium Scale Enterprise* (diterbitkan untuk bank dunia oleh Oxford University Press, 1987), 2

¹⁸ Hasan Al-Banna, *Majmu'at at-Rasail* (Alexandaria, Darud Dakwah, 1989), 267

Dari paparan di atas dapat ditegaskan bahwa peran wirausaha dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang tak terbantahkan. Kelangkaan wirausaha bahkan bisa menyebabkan kurangnya pertumbuhan ekonomi walaupun faktor-faktor lain banyak tersedia. Dalam hal ini pula Islam sangat mendorong pengembangan semangat wirausaha untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

4. Teknologi

Para ekonom menyatakan bahwa kemajuan teknologi merupakan sumber terpenting pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dianggap tidak mengikuti proses sejarah secara gradual, tidak terjadi terus-menerus dalam suatu keadaan yang tidak bisa ditentukan. Dinamika dan diskontinuitas tersebut berkaiatan erat dan ditentukan oleh inovasi-inovasi dalam bidang teknologi.

Kemajuan teknologi mencakup dua bentuk, yaitu inovasi produk dan inovasi proses. Inovasi produk berkaitan dengan produk-produk baru yang sebelumnya tidak ada atau pengembangan produk-produk sebelumnya. Sedangkan inovasi proses merupakan penggunaan teknik-teknik baru yang lebih murah dalam memproduksi produk-produk yang telah ada.

Islam tidak menantang konsep tentang perubahan teknologi seperti digambarkan di atas, bahkan dalam kenyataannya Islam mendukung

kemajuan teknologi. Perintah Al-quran untuk melakukan pencarian dan penelitian cukup banyak dalam Al-Quran. Dalam terma ekonomi bisa disebut dengan penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang menghasilkan perubahan teknologi. Dalam Al-Quran juga ada perintah untuk melakukan eksplorasi segala apa yang terdapat di bumi untuk kesejahteraan manusia.¹⁹

Eksplorasi ini jelas membutuhkan penelitian untuk menjadikan sumberdaya alam tersebut berguna dan bermanfaat bagi manusia.

Selain itu dalam Islam, terdapat instrumen ekonomi yang dapat mengentaskan kemiskinan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yaitu zakat, infaq, dan shadaqah. Zakat didistribusikan kepada 8 golongan yaitu orang-orang fakir, miskin, petugas zakat (*amīl*), muallaf (biasa diterjemahkan orang yang baru masuk Islam), budak, orang yang berutang dan tidak mampu membayar, *musāfir* dan *fi sabilillah*.

Ketika zakat dibagikan khususnya kepada orang fakir dan miskin, pengelolaan dana zakat tersebut harus diarahkan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Dana zakat yang diarahkan kepada kegiatan yang bersifat produktif menjadi modal bagi orang fakir dan miskin untuk

¹⁹ Ayat yang menjelaskan tentang perintah Allah untuk melakukan eksplorasi di bumi misalnya surat 16:14, 30:46, 35:12, 45:12, 36:33-35. Penjelasan tentang ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan ekonomi, Lihat Muhammad M.Akram Khan, *Economic Message of Quran*, (Kuwait, Islamic Book Published, 1996)

melakukan kegiatan kewirausahaan. Sehingga zakat dapat di katakan sebagai instrumen dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam ialah tidak hanya meningkatnya GDP suatu negara tetapi juga yang lebih penting lagi ialah berkurangnya orang-orang miskin di suatu negara dan terciptanya peningkatan kesejahteraan hidup secara merata bagi seluruh warga negara khususnya para fakir dan miskin.

3. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai "pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan".

Menurut Boediono, investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik²⁰. Dornbusch & Fischer berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah

²⁰ Boediono. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonommi No. 4 Teori Pertumbuhan Ekonomi*. (Yogyakarta : BPFE, 1992) hlm. 49

kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang. Persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu negara:

- a. Akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia;
- b. Perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya;
- c. Kemajuan teknologi.

Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (*output*) dan pendapatan di kemudian hari. Untuk membangun itu seyogyanya mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam bentuk "capital formation" untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi dibidang pengembangan sumberdaya manusia akan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.

Menurut Sadono Sukirno, kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan

meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat²¹. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yaitu (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Sukirno menyatakan bahwa kekurangan modal dalam Negara berkembang dapat dilihat dari beberapa sudut:

- a. Kecilnya jumlah mutlak kapita material;
- b. Terbatasnya kapasitas dan keahlian penduduk;
- c. Rendahnya investasi netto²².

Akibat keterbatasan tersebut, negara-negara berkembang mempunyai sumber alam yang belum dikembangkan dan sumber daya manusia yang masih potensial. Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas maka perlu mempercepat investasi baru dalam barang-barang modal fisik dan pengembangan sumberdaya manusia melalui investasi di bidang pendidikan dan

²¹Michael P. Todaro, dkk. *Pembangunan Ekonomi/Edisi ke 9, Jilid 1*. Alih Bahasa : Aris Munandar dan Puji A.L (Jakarta : Erlangga, 2006), hlm.116

²² Michael P. Todaro, dkk. *Pembangunan Ekonomi/Edisi ke 9, Jilid 1*, hlm.116

pelatihan. Hal ini sejalan dengan teori perangkap kemiskinan (*vicious circle*) yang berpendapat bahwa: (1) ketidakmampuan untuk mengarahkan tabungan yang cukup, (2) kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal, (3) taraf pendidikan, pengetahuan dan kemahiran yang relatif rendah merupakan tiga faktor utama yang menghambat terciptanya pembentukan modal di Negara berkembang.

Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes. Teori tersebut menitikberatkan pada peranan tabungan dan industri sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa:

- a. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Dalam perekonomian dua sektor (Rumah Tangga dan Perusahaan) berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai

dari titik original (nol)

- d. Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save =MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antar modal dan output (*Capital Output Ratio= COR*) dan rasio penambahan modal-output (*Incremental Capital Output Ratio*)²³

Teori ini memiliki kelemahan yaitu kecenderungan menabung dan ratio pertambahan modal-output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang. Demikian pula proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak konstan, harga selalu berubah dan suku bunga dapat berubah akan mempengaruhi investasi. Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan diasumsikan bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumberdaya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (*eksternalitas positif*) dan memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk

²³ Arsyad. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: BPF, 2004) hlm. 138

menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Implikasi yang menarik dari teori ini adalah mampu menjelaskan potensi keuntungan dari investasi komplementer (*complementary investment*) dalam modal atau sumberdaya manusia, sarana prasarana infrastruktur atau kegiatan penelitian. Mengingat investasi komplementer akan menghasilkan manfaat personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang untuk memperbaiki efisiensi alokasi sumberdaya domestik dengan cara menyediakan berbagai macam barang publik (sarana infrastruktur) atau aktif mendorong investasi swasta dalam industri padat teknologi dimana sumberdaya manusia diakumulasi. Dengan demikian model ini menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan investasi baik langsung maupun tidak langsung.

Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berdasarkan sumber dan kepemilikan modal, maka investasi swasta

dibagi menjadi penanaman modal dalam negeri dan asing. Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

Investasi sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu investasi langsung (*direct investment*) seperti berwirausaha/mengelola usaha sendiri pada sektor riil (*riil sector*) dan investasi tidak langsung (*indirect investment*) investasi pada sektor non-riil seperti investasi di perbankan syariah (deposito) dan pasar modal syariah melalui bursa saham syariah, reksadana syariah, sukuk, SBSN, dan lain-lain.

Untuk investasi jenis pertama diperlukan langkah yang cermat penuh perhitungan, keberanian mengambil risiko (*risk taker*), kehati-hatian dan sikap profesionalisme dalam mengelola suatu kegiatan usaha. Sedangkan investasi jenis kedua (sektor non-riil) risikonya tidak sebesar sektor riil, walau demikian tetap memerlukan perhitungan dan strategi yang matang agar terhindar dari kerugian yang besar.

4. Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam investasi agar terjadinya pertumbuhan ekonomi, diperlukan peningkatan produksi nasional. Peningkatan produksi nasional dapat terjadi karena adanya akumulasi modal yang diperoleh dari tabungan nasional yang nantinya akan digunakan untuk melakukan investasi.²⁴

Kegiatan investasi sebagaimana dijelaskan di atas, memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi perekonomian suatu negara. Namun demikian, secara prinsip, Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai sektor mana saja yang boleh dan tidak boleh dimasuki investasi. Tidak semua investasi yang diakui hukum positif, diakui pula oleh syariat Islam. Oleh sebab itu, agar investasi tersebut tidak bertentangan, maka harus memperhatikan dan memperhitungkan berbagai aspek, sehingga hasil yang didapat sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini adalah beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam²⁵:

1. Aspek material atau finansial. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif

²⁴ Elif Pardiansyah, "*Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris*", Jurnal *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol.8 No. 2, 2017, hlm 341

²⁵ Elif Pardiansyah, "*Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis Dan Empiris*", Vol.8 No. 2, 2017, hlm 341

dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.

2. Aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang subhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif (*darūrah*) secara individu maupun sosial.
3. Aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
4. Aspek pengharapan kepada rida Allah. Artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai rida Allah.

Islam adalah agama yang pro-investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat²⁶.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

²⁶ Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. (Jakarta: Mediakita.2011) hlm. 56

Artinya “supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian”²⁷

Oleh sebab itu dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad saw. selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (*mu’āmalah māliyah*), sehingga berlaku kaidah fikih, muamalah, yaitu “pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.(Fatwa” DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000)²⁸

5. Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi²⁹. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat

²⁷ Al-Qur’an 59: 7

²⁸<http://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/13/>, pada tanggal 02 mei 2020 pukul 23.07

²⁹Michael P. Todaro, dkk. *Pembangunan Ekonomi/Edisi ke 9, Jilid 1*. AlihBahasa : Aris Munandar dan Puji A.L (Jakarta : Erlangga, 2006) hlm. 81

benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi. Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen.

Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

Menurut Nordhaus W. bahwa suatu fungsi produksi suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah $q = f(K, L)$ dimana K merupakan

modal dan L adalah tenaga kerja yang memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi³⁰.

Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut dengan produk fisik marjinal (*Marginal Physical Product*). Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenagakerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan produktivitas namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan produktivitasnya serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimal setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi pengeluaran.

Payaman J. Simanjuntak, menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga³¹. Menurut BPS penduduk berumur 15 tahun

³⁰ Nordhaus, William. *Mikroekonomics 17th*. Alih Bahasa: Gretta dkk. (Jakarta: PT. Media Global Edukasi, 2004) hlm.121

³¹ Payaman J, Simanjuntak. *Pengantar Ekonommi Sumber Daya Manusia*. (Jakarta :LPFE UI, 1985) hlm. 88

ke atas terbagi sebagai Angkatan Kerja (AK) dan bukan AK. Angkatan Kerja dikatakan bekerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu. Sedangkan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut menganggur³². Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.

6. Tenaga Kerja Perspektif Islam

Kerja sebagai sebuah aktivitas yang menjadikan manusia produktif dan bernilai di mata Allah dan Rasulnya serta di mata masyarakat. Menurut Ibn Khaldun, kerja merupakan implementasi fungsi kekhalifahan manusia yang diwujudkan dalam menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditimbulkan dari hasil kerja³³. Adapun tenaga kerja sebagai pelaku dalam aktivitas kerja kini memiliki makna yang cukup luas. Dahulu mungkin masih sebatas diartikan sebagai modal

³²Payaman J, Simanjuntak. *Pengantar Ekonommi Sumber Daya Manusia..* hlm. 90

³³Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2001)hlm.363

produksi yang dimanfaatkan dari fisik manusianya saja yang bermanfaat bagi kelangsungan usaha. Namun kini tidak hanya mencakup kegiatan fisik yang dapat dimanfaatkan dan disebut tenaga kerja melainkan secara utuh sumber daya manusia tergolong sebagai tenaga kerja karena selain kegiatan fisik juga mencakup kemampuan non fisik seperti ide dan kreativitas. Tujuan utama bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, seperti kepemilikan yang halal dan tercukupi kebutuhan dasar manusia untuk mampu hidup berkelanjutan³⁴

Secara rinci istilah tenaga kerja adalah istilah *human resource* dimana didalamnya terkumpul semua atribut atau kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi barang dan jasa. Definisi ini semakin meluaskan pandangan kita akan makna tenaga kerja yang terdapat unsur-unsur yang berada didalamnya seperti intelektual, keterampilan, kejujuran, ketakwaan, tanggung jawab dan lain-lain³⁵. Kerja dan tenaga kerja dalam Islam menjadi kewajiban bagi umat yang mampu untuk

³⁴ Rosyada, D.(2018). *Promoting Islamic Values to Encourage Labour Performance and Productivity: Evidence From Some Indonesian Industries*. (*International Journal of Business and Society* 2018) Vol. 19 S4 , 591-604

³⁵ M. Sharif, Chaudhry. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj: Suherman Rosyidi. (Jakarta: Kencana.2012)hlm.56

mencapai sebuah kesuksesan bahkan memiliki kemuliaan tersendiri hingga telah tertulis didalam Al-Qur'an. Firman Allah di surah An-Najm ayat 39 tertulis:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

Menurut ayat ini, tidak ada jalan mudah menuju kesuksesan karena untuk mencapainya dibutuhkan perjuangan dan usaha. Kerja keras sebagai bentuk usaha dan semakin tinggi usahanya maka semakin tinggi pulalah imbalan yang akan diterima. Oleh karena itu dalam Islam mendorong umatnya yang menjadi tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas diri baik melalui pendidikan, pelatihan keterampilan dan juga peningkatan kualitas diri dari sisi moral.

Islam memandang kerja sebagai unsur produksi didasari konsep *istikhlāf*, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia, sedangkan tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk

mendapatkan imbalan yang pantas³⁶. Kesatuan dari kerja dan tenaga kerja dalam mengelola amanah Allah secara bertanggung jawab dan mampu menghasilkan sesuatu yang membawa manfaat atau masalah. Seorang pelaku ekonomi yang Islami akan berorientasi mencari masalah maksimum, karenanya mereka tidak hanya mempertimbangkan manfaat dari kerja yang dilakukan, tetapi juga kandungan berkah yang ada dalam kerja yang bersangkutan³⁷

Berikut beberapa hal dalam pemanfaatan tenaga kerja adalah melalui kontrak tenaga kerja (*ijārah*) dan diberikan imbalan (*ujrah*) kepadanya. Ijarah difahami sebagai menukar sesuatu dengan ada imbalannya dimana seorang *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga) memberikan imbalan atas pertukaran jasa dari seorang *ajīr* (orang yang dikontrak tenaganya)³⁸. Hubungan antara *musta'jir* dan *ajīr* dalam Islam telah diatur secara jelas dengan menjunjung nilai-nilai Islam dalam berakhlak dan adanya pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja kepada *musta'jir* (majikan).

³⁶ Huda .*Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. (Jakarta: Kencana,2008)hlm.227

³⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers,2011) hlm.364

³⁸Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers,2014)hlm.115

Hak dan kewajiban tenaga kerja adalah sebagai berikut³⁹:

- a. Hak-hak tenaga kerja mencakup: 1). memperlakukan tenaga kerja dengan menjunjung persaudaraan dan kesamaan di antara umat muslim tanpa membeda-bedakan golongan, ras, dan status sosial; 2). kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada tenaga kerja; 3). Islam mengharuskan kepastian dan kesegeraan dalam pembayaran upah artinya pembuatan kontrak kerja secara tertulis dengan pemberitahuan ketentuan upah secara jelas di awal kontrak kerja adalah wajib adanya dan pembayarannya tidak ditunda-tunda. Seperti dalam hadits, *“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringnya kering”* (HR. Ibnu Majah); 4). Tidak membebani para pekerja dengan pekerjaan yang berat di luar kekuatan fisiknya, jika pekerjaan itu berat dan pekerja tidak dapat mengerjakannya maka hendaklah majikan membantunya; 5). Penjaminan kesehatan yang cukup bagi tenaga kerja oleh majikan.
- b. Kewajiban tenaga kerja adalah hak majikan, adapun kewajiban tenaga kerja yaitu: 1). Memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja dengan sungguh-sungguh, jujur

³⁹ Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj: Suherman Rosyidi. (Jakarta: Kencana.2012)hlm 192-197

dan komitmen tinggi; 2). Sepenuh hati dalam mengambil ilmu dan manfaat dari pelatihan agar dapat meningkatkan kemampuan serta kualifikasinya; 3). Secara moral, tenaga kerja terikat untuk selalu setia dan menjaga amanah dalam bekerja; 4). Menjaga fisik untuk mencapai efisiensi tenaga kerja dan lebih produktif; 5). Kepemilikan pengetahuan dan kemampuan dalam memberikan pelayanan secara bertanggung jawab, hal ini menunjukkan kualitas-pun ditekankan dalam Islam seperti dalam Al-Qur'an menyebut cerita tentang Nabi Yusuf yang ditunjuk untuk menangani gudang dan lumbung di kekaisaran Mesir, di surah Yusuf ayat 55 sebagai berikut:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”

Pekerjaan dipandang sebagai bagian dari Ibadah sehingga bagaimana manusia dapat memanfaatkan kemampuannya seoptimal mungkin guna menghasilkan daya hasil yang baik dan mampu

memenuhi keseimbangan kebutuhan dasar hidupnya dan kehidupan sosialny.

7. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran Pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi⁴⁰.

Menurut Guritno, bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius

⁴⁰Sukirno. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ke 3* (Jakarta : Rajawali Press. 2012) hlm.74

kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat harga⁴¹.

Menurut Guritno, Pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah⁴². Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam penelitian ini mengedepankan teori dari sisi makro. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, teori Peacock dan Wiseman.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar dalam tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar,

⁴¹Jhingan.M.L.*Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*.Terj. D Guritno (Jakarta: Rajawali Press.2010) hlm.144

⁴²Jhingan.M.L.*Ekonomi pembangunan dan perencanaan*. hlm.144

dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat.

Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (Pusat – Provinsi – Daerah). Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan ini dapat mempunyai keputusan akhir – proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi. Oleh karena itu dalam memahami berbagai pengaturan

pendanaan bagi pemerintah pusat (daerah) maka harus mengetahui keragaman fungsi yang dibebankannya. Fungsi tersebut adalah :

1. Fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan kemasyarakatan;
2. Fungsi pengaturan, yaitu merumuskan dan menegakkan pusat perundangan;
3. Fungsi pembangunan, keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan penyediaan prasarana;
4. Fungsi perwakilan, yaitu menyatakan pendapat daerah di luar bidang tanggung jawab eksekutif;
5. Fungsi koordinasi, yaitu melaksanakan koordinasi dan perencanaan investasi dan tata guna tanah regional (daerah).

Argumentasi mengenai kebijakan publik dalam kaitan dengan kebijakan pengeluaran pemerintah didasarkan pada situasi bahwa pasar tidak bisa berperan sendiri mengaktifkan mobilisasi aktivitas ekonomi terutama untuk mencapai efisiensi .Adanya pengeluaran publik disebabkan adanya kegagalan pasar.

1. Tidak semua barang dan jasa diperdagangkan, Barang-barang yang menyebabkan eksternalitas dalam produksi maupun

konsumsi memaksa suatu pertentangan antara harga pasar dengan penilaian sosial dan pasar, dan pasar tidak bisa memastikan untuk memenuhi kondisi yang diinginkan.

2. Beberapa barang mempunyai karakteristik *increasing returns to scale*. Dalam kondisi monopoli alami seperti itu masyarakat dapat memperoleh harga lebih rendah dan output lebih tinggi apabila pemerintah berperan sebagai produsen Informasi asimetri antara produsen dan konsumen di bidang jasa seperti asuransi sosial dapat memberi peningkatan *moral hazard* dan pemilihan kurang baik. Oleh karena itu intervensi negara diperlukan agar menjamin pendistribusian kembali pendapatan.

Mundle berpendapat bahwa kemajuan teori dan studi empiris mengenai intervensi kebijakan publik dalam pengembangan manusia mencerminkan tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap aspek yang berkaitan dengan pembangunan sosial. Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan

memacu pertumbuhan ekonomi⁴³

Dalam perkembangannya, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi empat macam atas dasar: (1) pembiayaan fungsional (*functional finance*), (2) pengelolaan anggaran (*the managed budget approach*), (3) stabilisasi anggaran otomatis (*stabilizing budget*), (4) anggaran belanja seimbang (*balanced budget approach*)⁴⁴

1. Pembiayaan Fungsional

Dalam hal ini pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-

akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja. Di lain pihak pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta dan bukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, sehingga pada saat ada pengangguran, pajak sama sekali tidak diperlukan. Selanjutnya pinjaman akan dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang tersedia dalam masyarakat. Kemudian apabila pajak maupun pinjaman dirasa tidak tepat, maka ditempuhlah percetakan uang. Jadi pengeluaran pemerintah dan

⁴³Sukirno. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ke 3* (Jakarta : Rajawali Press. 2012) hlm.117

⁴⁴ Muhammad Nurdin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006), hlm. 92

perpajakan dipertimbangkan sebagai suatu hal yang terpisah. Namun demikian, ada kekhawatiran bahwa tanpa ada hubungan langsung antara keduanya akan ada bahaya yang timbul karena kemungkinan pengeluaran pemerintah semakin berlebihan.

2. Pengelolaan Anggaran

Pendekatan ini lebih banyak disukai “difungsional” karena pengeluaran pemerintah dimaksudkan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih mantap. Dalam pendekatan ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil kestabilan ekonomi, sehingga pada suatu saat dapat terjadi defisit maupun surplus. Dalam perkembangan yang lebih jauh lagi, pendekatan ini selalu berusaha untuk mempertahankan adanya anggaran belanja yang seimbang tanpa defisit anggaran belanja. Sehingga dalam masa depresi (perekonomian lesu), pengeluaran pemerintah akan ditingkatkan dan penerimaan pajak pun akan ditingkatkan pula, tetapi jangan sampai menimbulkan inflasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi, pajak akan dimanfaatkan sebaik-baiknya guna mencegah timbulnya akibat inflasi yang

tidak diinginkan. Kelebihan dari pendekatan ini adalah bahwa pinjaman negara tidak akan meningkat, tetapi sayangnya sektor swasta menjadi kurang bersemangat karena kurang percaya pada diri sendiri

3. Stabilisasi Anggaran Otomatis

Kebijakan fiskal mempunyai efek stabilisasi otomatis terhadap permintaan(*demand*) melalui kombinasi antara pengeluaran pemerintah yang merupakan insentif bagi perubahan pendapatan dan pembayaran pajak yang berbeda dengan pendapatan. Pada akhir tahun 1940-an, kepercayaan lebih banyak diberikan pada mekanisme otomatis dari politik fiskal. Penyesuaian secara otomatis dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah terjadi sedemikian rupa sehingga membawa perekonomian menjadi stabil tanpa campur tangan pemerintah yang disengaja. Dengan stabilisasi otomatis, pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasar atas perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh. Apabila ada kemunduran dalam kegiatan usaha, program pengeluaran pemerintah akan

meningkat terutama yang terkait dengan gaji, pensiun, bantuan sosial, dan sebagainya. Akibatnya, defisit dalam anggaran belanja pemerintah muncul dan mendorong perkembangan sektor swasta kembali sampai tercapainya kesempatan kerja penuh. Sebaliknya, pada masa inflasi ada kenaikan dalam penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak pendapatan dan tidak perlu tunjangan pengangguran, sehingga akan ada surplus anggaran belanja. Peranan *built-in* ini *flexibility* dapat ditingkatkan dengan penambahan pengeluaran pemerintah pada proyek-proyek pekerjaan umum.

4. Anggaran Belanja Seimbang

Suatu modifikasi dari pembelanjaan atas dasar anggaran yang disesuaikan dengan keadaan (*managed budget*) adalah pembelanjaan secara seimbang dalam jangka panjang, tetapi ditempuh defisit pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Kegagalan dalam mempertahankan keseimbangan anggaran dalam jangka panjang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dapat juga diikuti pendekatan serupa, tetapi tetap mempertahankan keseimbangan anggaran. Pada masa depresi, pengeluaran perlu

ditingkatkan diikuti dengan peningkatan penerimaan sehingga tidak akan memperbesar utang negara.

8. Pengeluaran Pemerintah Perspektif Islam

Di masa Rasulullah kebijakan anggaran masih sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Hal ini sebagian karena telah berubahnya keadaan sosio-ekonomik secara fundamental, dan sebagian lagi karena negara Islam yang didirikan juga dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. Negara yang menganut demokrasi, biasanya membuat anggaran belanja negara secara umum tiap tahun. Fakta anggaran belanja negara yang menganut demokrasi tersebut adalah bahwa anggaran belanjanya dinyatakan melalui peraturan yang disebut dengan peraturan anggaran belanja negara sekian tahunan. Kemudian ditetapkan sebagai peraturan setelah dibahas dengan parlemen. Di Indonesia misalnya, anggaran belanja negara tersebut dimuat dalam RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diajukan pemerintah kepada DPR untuk kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang APBN setiap tahunnya.

Pada masa Rasulullah pengeluaran negara tidaklah sekompleks pemerintahan di zaman modern saat ini, tetapi permasalahan yang ada secara historis tidaklah banyak jauh berbeda.

Jika diringkas dalam sebuah tabel maka alokasi pengeluaran pada masa Rasulullah adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1⁴⁵
Alokasi Pengeluaran Pemerintah Zaman Rosulullah

Primer	Sekunder
- Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta, dan persediaan	- Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah
- Penyaluran zakat dan ushr kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al-Qur'an termasuk	- Hiburan untuk para delegasi keagamaan
	- Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka
- Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muadzin, dan pejabat Negara lainnya. - Pembayaran utang Negara	- Hadiah untuk pemerintah negara lain
	- Pembayaran untuk pembebasan kaum muslim yang menjadi budak
- Bantuan untuk musafir (dari daerah fadak)	- Pembayaran Denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum muslimin
	- Pembayaran Utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin
	- Pembayaran tunjangan untuk orang miskin
	- tunjangan untuk sanak

⁴⁵Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* . hlm. 51

	saudara Rasulullah
	- Pengeluaran Rumah tangga Rasulullah (hanya sejumlah kecil, 80 butir kurma, dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya)
	- Persediaan Darurat (sebagian dari penapatan Khaibar)

Jika dilihat pada tabel di atas maka dapat diperlihatkan bahwa pengeluaran negara tidaklah begitu banyak. Rasulullah menghimpun pemasukan negara lalu mengeluarkannya sesegera mungkin. Hal ini dilakukan Rasulullah karena umat Islam masih membutuhkan harta tersebut.

Negara Islam dewasa ini harus mulai dengan pengeluaran yang mutlak diperlukan dan mencari jalan dengan cara-cara untuk mencapainya, baik dengan rasionalisasi struktur pajak atau dengan mengambil kredit dari sistem perbankan atau dari luar negeri⁴⁶. Oleh karena itu, di dalam Islam tidak mengenal pembuatan anggaran belanja negara tahunan sebagaimana yang terdapat dalam demokrasi, baik terkait dengan bab-babnya, pasal-pasalannya, maupun istilah-istilah dari

⁴⁶ Mannan, Abdul.. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf. (1997)hlm235

pasal tersebut. Anggaran belanja dalam negara Islam tidak dibuat dalam bentuk tahunan, meskipun negara Islam mempunyai anggaran belanja tetap yang bab-babnya telah ditetapkan oleh “syara mengikuti pendapatan dan pengeluarannya”⁴⁷

Dapat diketahui bahwa selama masa Islam dini, penerimaan zakat dan sedekah merupakan sumber pokok pendapatan. Di zaman modern penerimaan ini tidak dapat memenuhi persyaratan anggaran yang berorientasikan pertumbuhan modern dalam suatu negara Islam. Diperlukan untuk mengenakan pajak baru, terutama pada orang yang lebih kaya demi kepentingan kemajuan dan keadilan sosial. As-Sunnah dengan jelas menyatakan tentang hal ini: “selalu ada yang harus dibayar selain zakat.” Maka Rasulullah Saw. berpesan dan memerintahkan pengeluaran untuk kebajikan masyarakat. Sabdanya: “kekayaan harus diambil dari si kaya dan dikembalikan kepada si miskin” (HR. Bukhari).⁴⁸ Setiap warga negara harus menyumbangkan keuangan negara sesuai dengan kemampuannya yaitu sesuai dengan pendapatnya. Menurut prinsip ekonomi, biaya pungutan pajak tidak boleh melebihi pendapatan dari pungutan pajak itu sendiri. Akan tetapi

⁴⁷ Nabhani, Taqyiddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti. (1996).hlm.269

⁴⁸ Mannan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. hlm238

mengenai masalah zakat, pungutan zakat tidak memerlukan sistem organisasi yang lengkap yang membutuhkan biaya yang besar. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti amalan shalat setiap hari atau berpuasa sehingga kebanyakan orang berlomba-lomba mau menunjukkan melaksanakan tanggung jawab ini secepat mungkin⁴⁹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sistem perekonomian mengenai anggaran belanja, ada suatu perbedaan yang mendasar mengenai sistem anggaran belanja Islam dengan modern. Islam menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap urusan ummat, yang telah diserahkan oleh syara' dan ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama Islam. Berbeda dengan anggaran belanja modern lebih menekankan pada suatu campuran rumit antara rencana dan proyek.

Lebih lanjut, pembelanjaan pemerintah dalam koridor Negara Islam sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman al-Maliki yang dikutip oleh Mustafa Edwin Nasution, yaitu negara menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer per individu secara menyeluruh, dan membantu dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya. Jaminan pemenuhan kebutuhan

⁴⁹ Rahman, Azalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: t.p.1996) hlm.335

primer ini meliputi: Pertama, jaminan kebutuhan-kebutuhan primer bagi setiap individu secara menyeluruh. Kebutuhan ini meliputi sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal).Kedua, jaminan kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan.Kebutuhan-kebutuhan katagori ini meliputi keamanan, kesehatan dan pendidikan⁵⁰

Terkait kebijakan pengeluaran pemerintah, pengendalian anggaran yang efisien dan efektif merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syariah dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Alquran dan Hadis dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah⁵¹

- a. Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor masalah;
- b. Menghindari *mashaqqah* (kesulitan) dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan;
- c. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum;

⁵⁰ Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*.(Jakarta: Kencana. 2006) hlm.225-226

⁵¹ Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. hlm.225-226

- d. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum;
- e. Kaidah *al-ghiurnu bi al-gunny*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian);
- f. Kaidah “*mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa wājibun*”.
Yaitu kaidah yang menyatakan bahwa “sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya”.

Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu dalam mewujudkan efektifitas dan efesiensi pembelanjaan pemerintah dalam Islam. Adapun kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin;
2. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia;
3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

Adapun kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja umum pemerintah mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas. Secara rinci pembelanjaan negara harus didasarkan pada⁵² :

- a. Kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pejabat pemerintah.
- b. Kaidah efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya. Kaidah ini akan membawa pemerintah jauh dari sifat mubazir dan kikir, di samping alokasinya harus pada sektor-sektor yang sesuai syariah.
- c. Prinsip keadilan. Artinya, tidak hanya berpihak pada orang kaya saja dalam pembelanjaan.
- d. Prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi belanja negaranya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram.

⁵²Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. hlm.223-224

- e. Prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, dimulai dari yang wajib, sunnah, mubah atau darurat, hajiyyat, dan kamaliyyah.

Terkait dari beberapa kaidah tentang pembelanjaan dalam negara Islam di atas, kaidah-kaidah tersebut adalah hasil pemahaman dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis Rasul, di antaranya:

1. Q.S. al-Dzariyat (51): 19 disebutkan, *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*
2. Q.S. al-Baqarah (2): 219 yang artinya: *“...Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah “yang lebih dari keperluan” demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir”*.
3. Q.S. al-Hasyr (59): 7 disebutkan, *“...Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...”*.

Terdapat juga beberapa hadis Nabi yang menguatkan beberapa ayat di atas. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda, *“Sebaik-baik sedekah adalah sesuatu yang (diberikan) dari seseorang yang tidak membutuhkan dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.”* Demikian pula al-Hakim meriwayatkan dari

Abu al-Ahwash, bahwa Rasulullah bersabda, “Apabila engkau telah dianugerahi harta oleh Allah, maka hendaknya tanda-tanda nikmat dan kemudian (yang diberikan) Allah kepadamu tersebut ditambahkan.

Pada masa Rasulullah pengeluaran negara tidaklah sekompleks pemerintahan di zaman khalifah ataupun pemerintahan saat ini, tetapi permasalahan yang ada secara historis tidaklah banyak jauh berbeda. Jika diringkas dalam sebuah tabel maka alokasi pengeluaran pada masa Rasulullah adalah sebagai berikut.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini memuat berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain baik dalam bentuk penelitian biasa, skripsi, tesis dan jurnal. Penelitian yang ada telah mendasari pemikiran penulis dalam penyusunan Tesis, adapun penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Audrey Liwan dan Evan Lau (2007) yang berjudul *Managing Growth: “The Role of Export, Inflation and Investment in three ASEAN Neighboring”*, menunjukkan bahwa ekspor, investasi dan

inflasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia dan Thailand, hanya perbedaannya adalah pengaruhnya itu positif atau negative. Ekspor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia dan Thailand. Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Thailand dan Malaysia tetapi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tingkat inflasi di Indonesia cukup stabil selama beberapa tahun, yang mana membawa hubungan positif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia dan Thailand.

2. Penelitian yang dilakukan oleh A. Jalaluddin Sayuti (2012) dengan judul "Perkembangan Ekonomi Makro Negara Maju dan Berkembang di Asia dan Eropa". Disimpulkan bahwa keberadaan ekonomi antar negara saling mempengaruhi, artinya bila suatu negara mengalami kesulitan, maka akan berpengaruh bagi negara lain. Sebagai contoh, bila negara yang sulit itu adalah negara tujuan ekspor negara lain yang sedang baik ekonominya, maka saat sulit ekspor tidak akan

menjadi lancar, sebaliknya bila suatu negara baik, maka akan membutuhkan input dari negara lain dalam rangka mengatasi ketersediaan pasokan bahan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Meidiana tahun (2011) dengan judul "*Analysis Of The EffectOf Exports on Economic Growth In Indonesia Period*". Model di estimasidengan menggunakan kuadran terkecil biasa atau OLS (*Ordinary LeastSquare*). Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama dan semua variabel bebas berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Safitriani (2014) "*International Trade and Foreign Direct Investment in Indonesia*". Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan satu arah antara ekspor dan FDI dan terdapat hubungan dua arah antara impor dan FDI di Indonesia. FDI memberikan dampak jangka panjang yang positif terhadap ekspor, sementara dalam jangka pendek, FDI berdampak negatif terhadap ekspor. Namun dalam hal impor, ditemukan bahwa FDI memiliki dampak positif terhadap

impor meskipun secara statistik tidak signifikan

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliarti, Syamsul Amar dan Idris dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta di Indonesia (2014)”. Menggunakan data dari tahun 1984-2013 dengan menggunakan metode Two Stage Least Squared (TSLS)
6. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma dan Imam Prakoso dengan judul Penanaman Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Provinsi di Indonesia (2016). Dengan menggunakan General Methods of Moments (GMM) Hasil penelitian bahwa PMA tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya PMDN mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan PMA hanya mengisi kebutuhan dana atas sektor yang kurang strategis.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Taufan Harry Prasetyo dan Eny Sulistyaningrum pada tahun (2014) dengan judul “Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi” Penelitian ini menggunakan data panel dengan melibatkan 5 kabupaten dengan periode 8 tahun dengan

menggunakan *Location Quotient* (LQ) dengan menggunakan model fixed-effects Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap PDRB, sedangkan belanja operasi memiliki pengaruh positif terhadap PDRB. Belanja pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap PDRB, sedangkan belanja pemerintah bidang kesehatan tidak berpengaruh. Belanja pemerintah bidang infrastruktur memiliki pengaruh negatif terhadap PDRB. Tenaga kerja memiliki pengaruh positif PDRB.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Jamzani Sodik & Didi Nuryadin tahun (2005) dengan judul “Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional”, menggunakan metode GLS (General Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMA maupun PMDN tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode setelah otonomi, sedangkan sebelum otonomi, PMA dan PMDN berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Novi, Oki dan Myrnawati Savitri pata tahun (2014) dengan judul “Pengaruh

Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” hasil penelitian menunjukkan pengaruh bahwa kondisi infrastruktur jalan dan listrik berdampak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita, investasi terbukti secara empiris sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Susanti pada tahun (2008) dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan dengan menggunakan metode OLS” hasil analisis menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi selama periode penelitian lebih dipengaruhi oleh Konsumsi masyarakat dan investasi dibandingkan Ekspor Neto
11. Penelitian yang dilakukan oleh Try Handayani pada tahun (2011) dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 1999-2008” menggunakan metode analisis O bahwa data menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, *Infrastruktur*, *Growth* sebelumnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Audrey Liwan and Evan Lau (2007)	<i>Managing Growth: The Role of Export, Inflation and Investment in three ASEAN Neighboring Countries</i>	Ekspor, Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi	Ekspor Berpengaruh positif Terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia dan Thailand. Inflasi berpengaruh negative Terhadap pertumbuhan ekonomi Thailand dan Malaysia tetapi Berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan ekonomi Indonesia. Investasi berpengaruh positif Terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia dan Thailand.

2	A. Jalaluddin Sayuti (2012)	Perkembangan Ekonomi Makro Negara Maju dan Berkembang di Asia dan Eropa: Indonesia – China, Bosnia dan Herzegovina – Jerman	Makro ekonomi, GDP, Krisis	Hasil penelitian menunjukkan keberadaan ekonomi antar Negara saling mempengaruhi.
3	Meidiana (2011)	<i>Analysis Of The Effect Of Exports on Economic Growth In Indonesia Period</i>	PDB, ekspor, inflasi, dan nilai tukar	Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama dan secara parsial semua variabel bebas dalam model penelitian berpengaruh nyata dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
4	Suci Safitriani(2014)	<i>International Tradeand Foreign DirectInvestment in Indonesia</i>	FDI, Perdagangan Internasional	Hasil penelitian ini menunjukkan Terdapat hubungan satu arah antara ekspor dan FDI dan terdapat hubungan dua arah antara impor dan FDI di Indonesia.

5	Yuliarti, Syamsul Amar dan Idris (2014)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta di Indonesia	Konsumsi, Ekspor Neto, Tenaga Kerja, Belanja, Investasi Swasta, Suku bunga, Pengeluaran Pemerintah, Inflasi, Nilai Tukar, Pertumbuhan Ekonomi	Konsumsi, pengeluaran pemerintah dan investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Suku bunga, inflasi dan Pertumbuhan ekonomi Berpengaruh terhadap investasi swasta di Indonesia Suku bunga, inflasi, kurs dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah di Indonesia.
6	Rahma, Imam Prakoso(2016)	Penanaman Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Provinsi di Indonesia	PMA, PMDN, PDRB	PMA tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, Penanaman modal dalam negeri (PMDN) mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

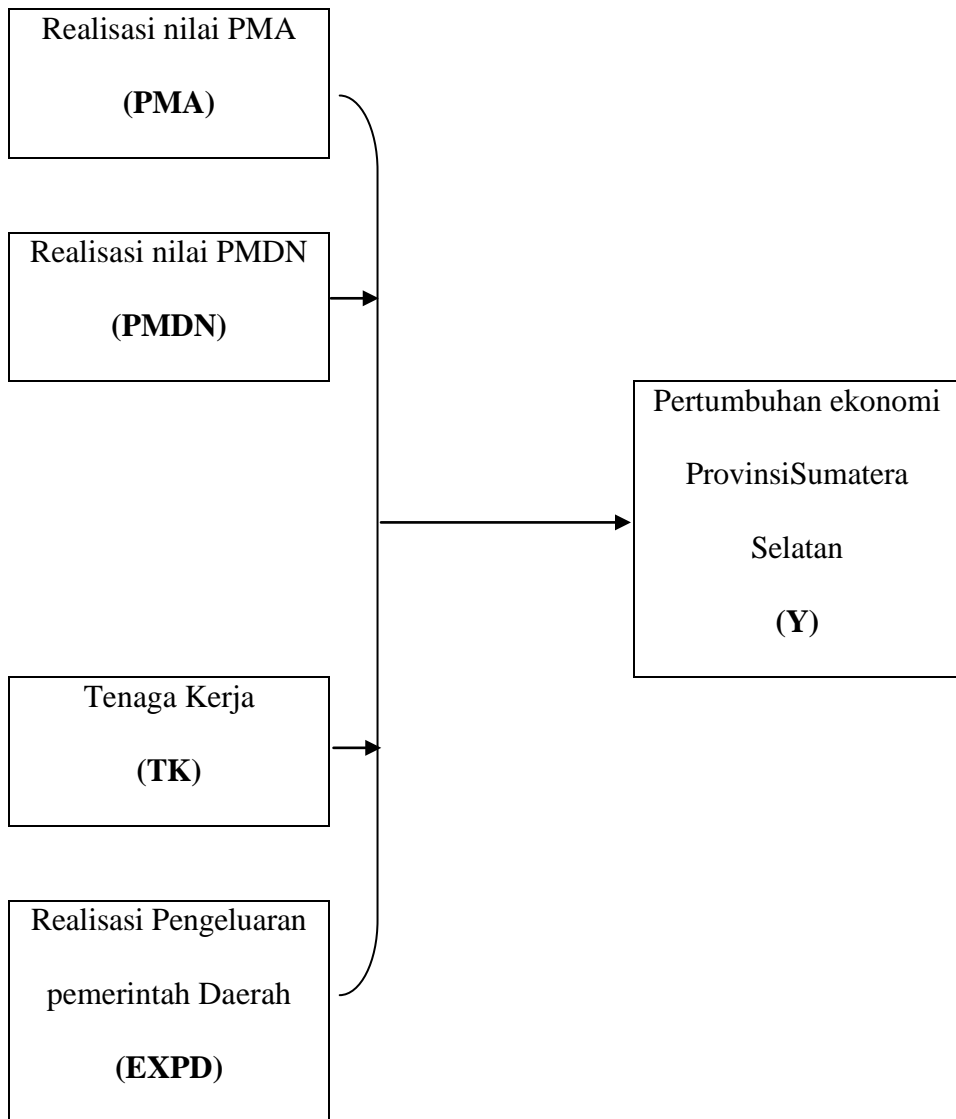
7	Taufan dan Eny (2014)	Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Belanja Modal, Belanja Operasi, Belanja pemerintah Bidang pendidikan, Belanja pemerintah Bidang kesehatan, Belanja pemerintah Bidang Infrastruktur Tenaga Kerja, PDRB	Belanja modal berpengaruh negative Terhadap PDRB, sedangkan belanja operasi memiliki pengaruh Positif terhadap PDRB. Belanja Pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap PDRB, sedangkan belanja pemerintah bidang kesehatan tidak berpengaruh. Belanja pemerintah Bidang infrastruktur memiliki pengaruh negatif terhadap PDRB. Tenaga kerja memiliki pengaruh positif PDRB.
8	Jamzani Sodik & Didi Nuryadin (2005)	Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus pada 26 Provinsi di Indonesia Pra dan Pasca Otonomi)	Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Laju Angkatan Kerja, Laju Inflasi, Ekspor Netto	PMA maupun PMDN tidak Berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Periode setelah otonomi, sedangkan sebelum otonomi, PMA dan PMDN

				berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional.
9	Novi, Oki dan Myrnawati Savitri (2014)	Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	PDRB, PMTB, AYS, ELEC, ROAD, LOAD, URBAN, OPEN, CSGRL, YAGR	Semua variable yang mendukung infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
10	Eva Susanti (2008)	Analisis factor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	PDB, Konsumsi, Investasi dan Ekspor Neto	Pertumbuhan Ekonomi selama periode penelitian lebih dipengaruhi oleh Konsumsi masyarakat dan investasi dibandingkan Ekspor Neto.
11	Try Handayani (2011)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 1999-2008	PMA, PMDN, Infrastruktur, <i>Growth</i>	PMA, PMDN, <i>Infrastruktur, Growth</i> sebelumnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu pengaruh Investasi : PMA, PMDN, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta. Tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai pengerak, penggagas dan pelaksana daripada pembangunan di suatu negara. Selain investasi dan tenaga kerja. Dengan bantuan pemerintah dari belanja pemerintah, juga berpengaruh positif dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian tingkat investasi baik PMA, PMDN, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah diharapkan menjadi pendorong dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Penelitian ini hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya dapat dibuat bagan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



D. Hipotesis Penelitian

Teori menurut Josep Allois Schumpeter investasi otonom (autonomous Investment) di pengaruhi oleh perkembangan-perkembangan jangka panjang seperti : tingkat investasi diramalkan akan meningkat, tingkat bunga, ramalan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, dan tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya⁵³

Adapun penelitian yang mengkaitkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja pada teori neo klasik tradisional “bahwa pertumbuhan output satu atau lebih dari tiga faktor kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi) serta penyempurnaan teknologi”⁵⁴. Teori diperkuat oleh jurn Safdari, berjudul Importance of Quality of Labour Force on Economic Growth in Iran menyimpulkan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan namun pentingnya tenaga kerja berkualitas disertai pendidikan guna meningkatkan produktivitas

⁵³Michael P. Todaro, dkk .*Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. AlihBahasa : Aris Munandar dan Puji A.L (Jakarta : Erlangga, 2006). hlm. 102

⁵⁴Michael P. Todaro, dkk .*Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. AlihBahasa : Aris Munandar dan Puji A.L. hlm.128

dalam jangka panjang⁵⁵.

Sedangkan pengeluaran pemerintah, peneliti mengutip Teori Keynes adalah bahwa pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari bentuk pendapatan nasional dimana formulasi pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X-M)$. Adapun untuk menguatkan teori ini didalam jurnal penelitian yang diteliti oleh Andrian Sutawijaya ekspor dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia tahun 1980 – 2006”. Menyimpulkan setiap peningkatan investasi pemerintah sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,084% dengan asumsi faktor lainnya konstan⁵⁶. Hal ini sejalan dengan tujuan investasi yang dilakukan pemerintah, di mana investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

1. Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Audrey Liwan dan Evan Lau (2007) yang berjudul *Managing Growth: “The Role of Export, Inflation and Investment in three ASEAN*

⁵⁵Safdari. *Importance of Quality of Labour Force On Economic Growth In Iran*. (University of qom: 2012). hlm. 1-6

⁵⁶Sutawijaya. *Pengaruh Ekspor dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1980-2006* (Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka: 2010). hlm.14

Neighboring”, menunjukkan bahwa ekspor, investasi dan inflasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia dan Thailand, hanya perbedaannya adalah pengaruhnya itu positif atau negative. Ekspor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia dan Thailand. Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Thailand dan Malaysia tetapi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tingkat inflasi di Indonesia cukup stabil selama beberapa tahun, yang mana membawa hubungan positif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia dan Thailand

H1 : Nilai investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan penelitian Neni Pancawati, yang berjudul “Pengaruh rasio kapital tenaga kerja, pendidikan, stok kapital & pertumbuhan penduduk terhadap GDP Indonesia. Rasio tenaga kerja-kapital berpengaruh, positif terhadap pertumbuhan output,

Tk. Pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan output, Perubahan stok kapital berpengaruh positif terhadap pertumbuhan output, Pertumbuhan penduduk berpengaruh negative terhadap pertumbuhan output.

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

3. Realisasi pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Yuliarti, Syamsul Amar dan Idris dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta di Indonesia (2014)”.Menggunakan data dari tahun 1984-2013 dengan menggunakan metode Two Stage Least Squared (TSLS). Konsumsi, pengeluaran pemerintah dan investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tenaga Kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan Indonesia. Suku bunga,inflasi dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap investasi swasta di Indonesia. Suku bunga,

inflasi, kurs dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah di Indonesia.

Dari penelitian di atas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Realisasi pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Nilai investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Yuliarti, Syamsul Amar dan Idris dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta di Indonesia (2014)”. Menggunakan data dari tahun 1984-2013 dengan menggunakan metode Two Stage Least Squared (TSLS). Konsumsi, pengeluaran pemerintah dan investasi swasta berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tenaga Kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan Indonesia. Suku bunga, inflasi dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap investasi swasta di Indonesia. Suku bunga, inflasi, kurs dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap

pengeluaran pemerintah di Indonesia.

Dari penelitian di atas maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Nilai investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi